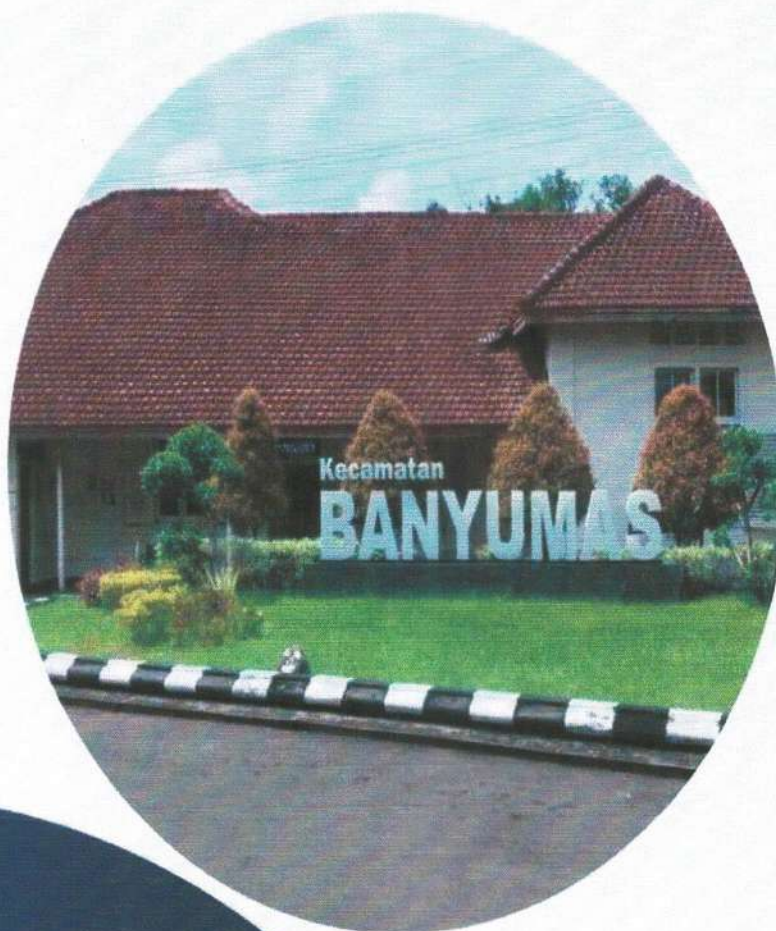




RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANYUMAS TAHUN 2025-2029



**KECAMATAN
BANYUMAS**

DAFTAR ISI :

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang.....	3
1.2	Landasan Hukum.....	4
1.3	Maksud dan Tujuan.....	5
1.4	Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANYUMAS	
2.1	Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas.....	8
2.2	Sumber Daya Kecamatan Banyumas.....	11
2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Banyumas.....	16
2.4	Kelompok Sasaran Layanan.....	20
2.5	Permasalahan dan Isu Strategis.....	20
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1	Tujuan.....	23
3.2	Sasaran.....	23
3.3	Strategi.....	23
3.4	Arah Kebijakan.....	23
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	25
4.2	Target Keberhasilan IKU.....	41
4.3	Sub Kegiatan Prioritas.....	42
BAB V	PENUTUP	
	Penutup.....	43
LAMPIRAN		
	Tabel Risiko Strategis 2025-2029.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

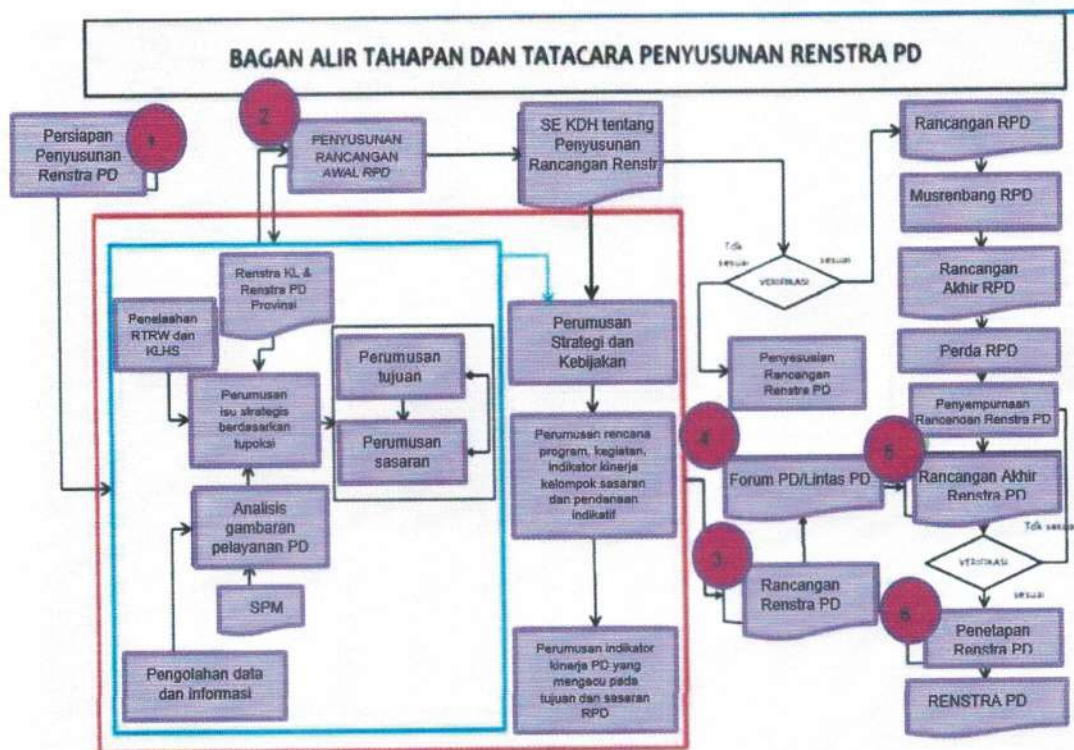
Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Setelah terpilihnya Kepala Daerah baru hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024, Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2039.

Renstra Kecamatan Banyumas merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu tiga tahun (2025-2029) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyumas dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan Banyumas telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan pemerintahan umum fungsi kewilayahan yang harus dilaksanakan

oleh Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2025-2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan umum fungsi kewilayahan selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumas;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Banyumas;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Banyumas Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Banyumas Tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang program, kegiatan dan subkegiatan, dukungan subkegiatan pada program prioritas pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Banyumas.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, substansi, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN
BANYUMAS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas pokok Kecamatan adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan dengan didukung program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban desa;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban desa;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

- pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat ketentraman dan ketertiban desa;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
 - g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
 - h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;
- i. Pemerintah Desa.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI
KABUPATEN BANYUMAS.



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 68 Tahun 2018

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai di lingkungan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 sebanyak 11 orang, terdiri dari 8 PNS, 3 PPPK dan 9 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak SMA Sederajat sejumlah 11 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS	PPPK	CPNS	Non PNS	
1	SD	1	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	3	1		7	11
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	-	-	-	-	-
6	S1	4	2	-	2	8
7	S2	3	-	-	-	3
8	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		11	3		9	23

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banyumas Tahun 2025

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 7 orang pada tahun 2025, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	2
3	Golongan III	7
4	Golongan IV	1

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banyumas Tahun 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin per 1 Januari 2025 dengan perincian sebagai berikut;

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Banyumas per 1 Januari 2025

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan
1	2	3	4	5	6
132010305010	Pompa Air	1	Buah	APBD Kab.	2023
132020101003	Station Wagon	1	Unit	APBD Kab.	2010
132020101003	Station Wagon	1	Unit	APBD Kab.	2024
132020104001	Sepeda Motor	1	Unit	APBD Kab.	2009
132020104001	Sepeda Motor	1	Unit	APBD Kab.	2012
132020104001	Sepeda Motor	2	Unit	APBD Kab.	2012
132020104001	Sepeda Motor	1	Unit	APBD Kab.	2014
132020104001	Sepeda Motor	2	Unit	APBD Kab.	2014
132020104001	Sepeda Motor	1	Unit	APBD Kab.	2016
132020104001	Sepeda Motor	1	Unit	APBD Kab.	2017
132020201002	Gerobak Dorong	2	Buah	APBD Kab.	2017
132020201002	Gerobak Sampah	3	Buah	APBD Kab.	2017
132050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Buah	APBD Kab.	2022
132050102010	Dispenser Mesin Antrian	1	Buah	APBD Kab.	2018
132050104002	Lemari Kayu	1	Buah	APBD Kab.	2002
132050104002	Lemari Kayu	1-2	Buah	APBD Kab.	2007
132050104002	Lemari Kayu	1	Buah	APBD Kab.	2008
132050104002	Lemari	1	Buah	APBD Kab.	2012
132050104002	Lemari Kayu	1	Buah	APBD Kab.	2013
132050104002	Lemari Pakaian	1	Buah	APBD Kab.	2014
132050104002	Lemari Kayu	2	Buah	APBD Kab.	2014
132050104002	Lemari Kayu/Bufet	1	Buah	APBD Kab.	2015
132050104002	Lemari Pakaian	1	Buah	APBD Kab.	2020
132050104003	Rak Besi/Metal	1	Set	APBD Kab.	1997
132050104003	Rak Besi/Metal	1	Set	APBD Kab.	1998
132050104003	Rak Besi/Metal	1	Set	APBD Kab.	2015
132050104003	Rak Besi/Metal	1-2	Set	APBD Kab.	2018
132050104003	Rak Besi/Metal	3	Set	APBD Kab.	2018
132050104007	Brand Kas	1	Set	APBD Kab.	1945
132050104026	Filling Besi/Metal	1	Set	APBD Kab.	2011
132050104026	Filling Besi/Metal	3	Set	Pembelian	2011
132050104026	Filling Besi/Metal	1	Set	APBD Kab.	2012
132050104026	Filling Besi/Metal	2	Set	APBD Kab.	2014
132050104026	Filling Besi/Metal	1-2	Set	APBD Kab.	2017
132050104026	Lemari Sorok	1	Buah	APBD Kab.	2018
132050104026	Lemari Sorok	1-5	Buah	APBD Kab.	2019
132050104026	Lemari Sorok	6	Buah	APBD Kab.	2019
132050104027	Lemari Etalase	1	Buah	APBD Kab.	2015
132050105002	CCTV - Camera Control Television System	1	Set	APBD Kab.	2023
132050105003	Papan Visuil	1	Buah	APBD Kab.	1997
132050105003	Papan Visuil	1	Buah	APBD Kab.	1999
132050105003	Papan Visuil	1	Buah	APBD Kab.	2004
132050105003	Running Text	1	Set	APBD Kab.	2018
132050105012	Mesin Absensi	1	Unit	APBD Kab.	2016
132050105012	Mesin Absensi	1	Unit	APBD Kab.	2020
132050105023	Overhead Proyektor (OHP)	1-2	Unit	APBD Kab.	2018
132050105076	Papan Nama Instansi	1	Buah	APBD Kab.	1993
132050105076	Papan Nama Instansi	1	Buah	APBD Kab.	2007
132050105077	Papan Pengumuman	1-10	Buah	APBD Kab.	2007
132050105077	Papan Spanduk	1	Buah	APBD Kab.	2019
132050105077	Papan Informasi	1	Buah	APBD Kab.	2020

132050105088	Alat Kantor Lain - Lain (BACKGROUND PATEN)	4	Set	APBD Kab.	2014
132050105088	Kursi Susun	1-48	Buah	APBD Kab.	2018
132050105088	Kursi Tunggu	51-52	Buah	APBD Kab.	2018
132050105088	Kursi Tunggu	53-54	Buah	APBD Kab.	2018
132050105088	TV LED	1	Unit	APBD Kab.	2018
132050105088	Sound System	1	Set	APBD Kab.	2018
132050105088	Camera Digital	1	Unit	APBD Kab.	2018
132050105088	TV LED	1	Unit	APBD Kab.	2018
132050105088	Meja Komputer	60	Buah	APBD Kab.	2018
132050105088	Backdrop Ruang Pelayanan	1	Set	APBD Kab.	2019
132050105088	Lampu Acrylic "Kecamatan Banyumas"	1	Set	APBD Kab.	2020
132050201002	Meja Kursi Makan	1	Set	APBD Kab.	2014
132050201002	Kursi Taman	1-2	Buah	APBD Kab.	2020
132050201002	Meja Kerja Kayu	1-3	Buah	APBD Kab.	2022
132050201005	Zice	1	Buah	APBD Kab.	2007
132050201008	Meja Rapat	1-5	Buah	APBD Kab.	2002
132050201008	Meja Rapat	1-6	Buah	Pembelian	2010
132050201008	Meja Rapat	1-10	Buah	APBD Kab.	2023
132050201009	Tempat Tidur Besi/Metal (lengkap)	1	Buah	APBD Kab.	2020
132050201010	Tempat Tidur Kayu	1	Buah	APBD Kab.	2014
132050201010	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	2	Buah	APBD Kab.	2014
132050201012	Meja Telpon	1	Buah	APBD Kab.	2001
132050201014	Meja Pelayanan	1	Buah	APBD Kab.	2019
132050201017	Kursi Tunggu	2-3	Buah	APBD Kab.	2013
132050201024	Meja 1/2 Biro	1	Buah	APBD Kab.	1990
132050201024	Meja 1/2 Biro	1	Buah	APBD Kab.	1993
132050201024	Meja 1/2 Biro	1	Buah	APBD Kab.	1998
132050201024	Meja 1/2 Biro	1	Buah	APBD Kab.	2000
132050201024	Meja 1/2 Biro	1	Buah	APBD Kab.	2001
132050201030	Kursi Rapat	1-2	Buah	APBD Kab.	2019
132050201030	Kursi Rapat	3-41	Buah	APBD Kab.	2019
132050201031	Kursi Tamu	1	Buah	APBD Kab.	2018
132050201031	Kursi Tamu	2	Buah	APBD Kab.	2018
132050201032	Kursi Putar	1	Buah	Pembelian	2011
132050201032	Kursi Putar	1-5	Buah	Sewa	2015
132050201036	Kursi Lipat	1	Buah	APBD Kab.	2005
132050201039	Meja Komputer	1	Buah	APBD Kab.	2012
132050201039	Meja Komputer	2-3	Buah	APBD Kab.	2012
132050201039	Meja Komputer	1	Buah	APBD Kab.	2019
132050201050	Meubelair Lain - Lain (Lemari Kaca)	1	Set	APBD Kab.	2014
132050201050	Penyekat Ruang / Rana	1-14	Set	APBD Kab.	2019
132050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Unit	APBD Kab.	2019
132050203003	Mesin Potong Rumput	1	Unit	APBD Kab.	2017
132050203003	Mesin Potong Rumput	2	Unit	APBD Kab.	2017
132050203003	Mesin Pemotong Rumput dorong	1	Unit	APBD Kab.	2024
132050203007	Alat Pembersih Lain – Lain	2	Set	APBD Kab.	2007
132050204001	Lemari Es	1	Buah	APBD Kab.	2018
132050204003	AC Unit	1	Unit	APBD Kab.	2012
132050204003	AC Unit	1-4	Unit	APBD Kab.	2013
132050204003	AC Unit	5	Unit	APBD Kab.	2013
132050204003	AC Unit	1	Unit	APBD Kab.	2014
132050204004	A.C. Split	1	Unit	APBD Kab.	2023
132050204004	A.C. Split	2	Unit	APBD Kab.	2023
132050204004	AC	1	Unit	APBD Kab.	2024

132050204006	Kipas Angin	1-6	Unit	APBD Kab.	2012
132050205005	Alat/Perabot Dapur Lainnya	1	Set	APBD Kab.	2008
132050205005	Rak Piring	1	Set	APBD Kab.	2015
132050205026	Alat Dapur Lainnya	1-3	Set	APBD Kab.	2010
132050205026	Alat Dapur Lainnya	2	Set	APBD Kab.	2010
132050206002	Televisi + Bracket	1	Set	APBD Kab.	2018
132050206002	Televisi + Bracket	2	Set	APBD Kab.	2018
132050206005	Amplifier	5	Set	APBD Kab.	2021
132050206007	Speaker / Salon	1-2	Set	APBD Kab.	2015
132050206007	Speaker	1	Set	APBD Kab.	2018
132050206007	Loudspeaker	2-5	Set	APBD Kab.	2018
132050206007	Loudspeaker	1	Set	APBD Kab.	2021
132050206007	Loudspeaker	2	Set	APBD Kab.	2021
132050206007	Loudspeaker	3-4	Set	APBD Kab.	2021
132050206008	Sound System	1	Set	APBD Kab.	2013
132050206013	Megaphone	1	Buah	APBD Kab.	2004
132050206015	Microphone Floor Stand	1-2	Buah	APBD Kab.	2019
132050206016	Microphone Table Stand	6	Buah	APBD Kab.	2021
132050206021	Camera Outdoor	5-7	Buah	APBD Kab.	2018
132050206028	Lambang Garuda Pancasila	1	Set	APBD Kab.	2003
132050206032	Tiang Bendera	1	Set	APBD Kab.	2019
132050206036	Tangga Aluminium	1	Set	APBD Kab.	2015
132050206038	Dispencer	1	Unit	APBD Kab.	2017
132050206038	Dispencer	2	Unit	APBD Kab.	2017
132050206038	Dispencer	1	Unit	APBD Kab.	2018
132050206038	Dispencer	2	Unit	APBD Kab.	2018
132050206038	Dispenser Artugo	1	Unit	APBD Kab.	2024
132050206039	Mimbar/Podium	1	Unit	APBD Kab.	2003
132050206039	Mimbar/Podium	1	Unit	APBD Kab.	2009
132050206039	Mimbar/Podium	1	Unit	APBD Kab.	2024
132050206062	Alat Pemanas / Water Heater	1-2	Unit	APBD Kab.	2018
132050206069	Lampu Tiang Taman	1-3	Buah	APBD Kab.	2022
132050206069	Lampu Hias Gantung Pendopo	1	Buah	APBD Kab.	2024
132050206075	Tangki Air	2	Buah	APBD Kab.	2023
132050206077	Alat Rumah Tangga Lain – Lain	1	Set	APBD Kab.	2010
132050206077	Water Torn	1	Buah	APBD Kab.	2014
132050206077	Tempat Sampah Jumbo	11	Buah	APBD Kab.	2018
132050206077	Korden Ruang Tamu	1-6	Buah	APBD Kab.	2019
132050206077	Karpet	2	Buah	APBD Kab.	2019
132050206077	Karpet	7	Buah	APBD Kab.	2019
132050206077	Gorden	1	Buah	APBD Kab.	2020
132050207001	Alat Pemadam/Portable	1-3	Buah	APBD Kab.	2015
132050207001	Alat Pemadam/Portable	1	Buah	APBD Kab.	2024
132050301006	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah	APBD Kab.	2013
132050301009	Meja Pelayanan	1	Buah	APBD Kab.	2013
132050301009	Meja Rapat	1-4	Buah	APBD Kab.	2017
132050301009	Meja Kerja	1-6	Buah	APBD Kab.	2018
132050301009	Meja Biro Sedang	7-14	Buah	APBD Kab.	2018
132050302011	Meja Kursi Tamu Biasa	1	Buah	APBD Kab.	2015
132050303005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah	APBD Kab.	2013
132050303009	Kursi Kerja	1-15	Buah	APBD Kab.	2018
132050306005	Kursi Tamu	1	Buah	APBD Kab.	2022
132060101005	Audio Amplifier / Mixer	1	Set	APBD Kab.	2015
132060101016	Compact Disc Player (VCD)	1	Set	APBD Kab.	2019
132060101036	Microphone/Wireless Mic	1	Buah	APBD Kab.	2019
132060101036	Microphone/Wireless MIC	1	Buah	APBD Kab.	2023
132060101037	Microphone/Boom Stand	1-2	Buah	APBD Kab.	2019

132060101048	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	Set	APBD Kab.	2018
132060101059	Power Amplifier 2200 Watt	1	Set	APBD Kab.	2019
132060101059	Power Amplifier 1200 Watt	2	Unit	APBD Kab.	2019
132060101096	Camera + Attachmen	1	Unit	APBD Kab.	2012
132060101096	LCD Proyektor	1	Unit	APBD Kab.	2017
132060101096	Alat Studio Visual	1	Set	APBD Kab.	2019
132060101096	Alat Studio Visual	2	Set	APBD Kab.	2019
132060101096	Alat Studio Visual	3-4	Set	APBD Kab.	2019
132060101096	Alat Studio Visual	5-6	Set	APBD Kab.	2019
132060101096	Alat Studio Visual	7	Set	APBD Kab.	2019
132060101096	Alat Studio Visual	8	Set	APBD Kab.	2019
132060101096	Alat Studio Visual	9	Set	APBD Kab.	2019
132060101096	Alat Studio Visual	12	Set	APBD Kab.	2019
132060101096	Alat Studio Visual	13	Set	APBD Kab.	2019
132060102029	Equalizer	1	Set	APBD Kab.	2019
132060102045	Tripod Camera	1	Buah	APBD Kab.	2024
132060102126	Camera Digital	1	Buah	APBD Kab.	2022
132060201001	Jaringan Telephone PABX	1	Set	APBD Kab.	2018
132060201010	Faksimile	1	Set	APBD Kab.	2002
132060202001	Unit Transceiver SSB Portable	1	Buah	APBD Kab.	1992
132100101004	Internet	1	Set	APBD Kab.	2014
132100102001	Personal Computer Unit (PC)	1-2	Unit	APBD Kab.	2014
132100102001	Personal Computer Unit (PC)	1-4	Unit	APBD Kab.	2018
132100102001	Personal Computer Server	5	Unit	APBD Kab.	2018
132100102001	Personal Computer Client Antrian	6	Unit	APBD Kab.	2018
132100102001	P.C AIO	1-3	Unit	APBD Kab.	2022
132100102002	Lap Top	1	Unit	APBD Kab.	2013
132100102002	Lap Top	1-2	Unit	APBD Kab.	2014
132100102002	Lap Top	1	Unit	APBD Kab.	2015
132100102002	Lap Top	2	Unit	APBD Kab.	2015
132100102002	Lap Top	1-2	Unit	APBD Kab.	2018
132100102002	Lap Top	3	Unit	APBD Kab.	2018
132100102002	Lap Top	1	Unit	APBD Kab.	2021
132100102002	Lap Top	2	Unit	APBD Kab.	2021
132100102002	Lap Top	1	Unit	APBD Kab.	2022
132100102002	Lap Top	1	Unit	APBD Kab.	2023
132100102002	Lap Top	1	Unit	APBD Kab.	2024
132100102002	Lap Top	2	Unit	APBD Kab.	2024
132100201006	CPU Unit	1	Unit	APBD Kab.	2020
132100202017	Printer	1-2	Unit	APBD Kab.	2018
132100202017	Printer	3	Unit	APBD Kab.	2018
132100202017	Printer	1	Unit	APBD Kab.	2020
132100202017	Printer	2	Unit	APBD Kab.	2020
132100203001	CPU	1	Unit	APBD Kab.	2017
132100203001	CPU	2-3	Unit	APBD Kab.	2017
132100203002	Monitor	1	Unit	APBD Kab.	2017
132100203002	Monitor	2-3	Unit	APBD Kab.	2017
132100203003	Printer	3	Unit	APBD Kab.	2016
132100203003	Printer	1	Unit	APBD Kab.	2017
132100203003	Printer	1	Unit	APBD Kab.	2022
132100203007	Harddisk External	1	Unit	APBD Kab.	2018
132100203018	DVR CCTV	1	Set	APBD Kab.	2018
132100204002	Router	1	Set	APBD Kab.	2014
132100204033	Wireless(Amplifier)	1	Set	APBD Kab.	2014

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Banyumas diukur dari ketercapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring misi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Banyumas, strategi yang turut mendukung pencapaian tersebut adalah :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan sesuai SOP;
2. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
3. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik;
4. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban di Tingkat Kecamatan;
5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
7. Optimalnya kinerja pelayanan penunjang Pemerintahan Kecamatan.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra dalam 5 (Lima) Tahun

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi					Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
2	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan (Nilai SAKIP)	-	-	-	-	85	-	-	-	-	80,85	-	-	-	-	95,12%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	-	-	-	-	85	-	-	-	-	89	-	-	-	-	104,7%	
4	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
5	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
6	Persentase Desa yang aktif dalam Kegiatan pemberdayaan masyarakat	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
7	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi					Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
8	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
9	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
10	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
11.	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
12.	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
13.	Persentase APBDes tepat waktu	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
14.	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
15.	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi					Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
16.	Persentase penanganan pengaduan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
17.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
18.	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	

2.1.4Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Banyumas adalah semua perangkat daerah, DPRD, instansi vertical, akademisi dan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banyumas mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Banyumas

Masalah Pokok	Masalah			Akar Masalah		
Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1,1	1	Belum optimalnya hasil pembinaan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa	1,1,1	1	kurangnya pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran
	1,2	2	Belum optimalnya peran kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa	1,1,2	2	kurangnya fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
	1,3	3	Belum optimalnya peran kecamatan dalam keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	1,1,3	3	Belum optimalnya penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
	1,4	4	Belum optimalnya kualitas pelatanan administrasi masyarakat	1,1,4	4	elum optimalnya pelayanan sesuai SOP

Masalah Pokok	Masalah			Akar Masalah		
				1,1,4	5	Belum optimalnya sarana dan prasarana pemerintah kecamatan
				1,1,4	6	Belum optimalnya pengelolaan SDM pelayanan kecamatan

Sumber : RPJMD Tahun 2025

2.1.1 Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumas merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumas adalah belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Berikut disajikan tabel 2.7 yang memuat analisis Isu-Isu di Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, dan Regional) yang dapat dikembangkan menjadi Isu Strategis Pemerintah Daerah Kecamatan Banyumas :

Tabel 2.7

Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis Pemerintah Daerah Kecamatan Banyumas

Potesi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan industri peternakan 3. Pengembangan industri perkebunan dan pertanian	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, Keamanan dan Kapasitas Keuangan Daerah	Berkurangnya kesenjangan; (Goal : Mengurangi kesenjangan Intra dan Antarnegara)	Isu Pembangunan Perkotaan: Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional, Urban Sprawl, Isu Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi dan Tata Kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sumber : e-Planning 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Banyumas Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Banyumas dapat secara tepat mengetahui yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas adalah Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan.

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah Peningkatan Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan kepada masyarakat, Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Kecamatan.

Table 3.1
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pengembangan Kompetensi Spesifik SDM Pengelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan penerapan pelayanan terstruktur dan transparan	Penguatan Manajemen Pelayanan dan Sistem Pengelolaan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penguatan Sistem Manajerial Kecamatan	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan

Keterkaitan antara arah kebijakan RPJMD dengan arah kebijakan RENSTRA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	STRATEGI	PENAHAPAN STRATEGI RENSTRA PD				
			2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Optimalisasi Manajemen SDM Kecamatan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Desa	Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana dalam rangka optimalisasi Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan kecamatan dalam rangka terwujudnya akuntabilitas pemerintahan kecamatan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Berikut disajikan tabel 4.1 yang berisi keseluruhan Program Kecamatan Banyumas tahun 2025-2029 :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - d. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

- Kepala Daerah
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Banyumas
Tahun 2025-2029

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
					Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas						2719562604		3074877000		3120360000		3162126000		3195497000		3203110000
			Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A		100		100		100		100		100	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan					2719562604		3074877000		3120360000		3162126000		3195497000		3203110000
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81,3		81,4		81,45		81,46		81,5		81,6	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,1		3,12		3,13		3,14		3,15		3,16	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	

			Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A		100		100		100		100		100	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3250000		13000000		13260000		13525000		13795000		14070000
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100		100		100		100		100		100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					3250000		13000000		13260000		13525000		13795000		14070000
		Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A		4		4		4		4		4	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					3250000		13000000		13260000		13525000		13795000		14070000
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	1		3		3		3		3		3	

			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1		3		3		3		3		3	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7770000		38225000		38989000		39768000		40563000		41374000
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100		100		100		100		100		100	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					7770000		38225000		30489000		31968000		32863000		33874000
		Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100		100		100		100		100		100	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2520000		10000000		8500000		9750000		10125000		10250000
		Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4		4		4		4		4		4	

7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					3495000		18225000		13489000		13618000		13788000		14374000
		Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4		4		4		4		4		4	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1755000		10000000		8500000		8600000		8950000		9250000
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	4		4		4		4		4		4	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									8500000		7800000		7700000		7500000
		Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100		100		100		100		100		100	

7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									8500000		7800000		7700000		7500000
		Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A		N/A		4		4		4		4	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					11770000		47000000		47940000		48898000		49875000		50872000
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100		100		100		100		100		100	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					11770000		47000000		47940000		48898000		49875000		50872000
		Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	4		4		6		6		7		7	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					1515000		16000000		17500000		18500000		19500000		20000000

		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3		3		3		4		4		4	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					10255000	31000000		30440000		30398000		30375000		30872000	
		Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1		3		3		3		3		3	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4380000	32000000		32640000		33292000		33957000		34636000	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100		100		100		100		100		100	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85		85		85		85		85		85	

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							10000000		10000000		10000000		10000000		10000000
		Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100		100		100		100		100		100	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							10000000		10000000		10000000		10000000		10000000
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3		3		3		3		3		3	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					4380000		22000000		22640000		23292000		23957000		24636000
		Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100		100		100		100		100		100	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1380000		10000000		10000000		11000000		11000000		11000000
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1		3		3		4		4		4	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					3000000		12000000		12640000		12292000		12957000		13636000

		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2		4		4		4		4		4	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1500000		14350000		14637000		14929000		15227000		15531000
		Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100		100		100		100		100		100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1500000		14350000		14637000		14929000		15227000		15531000
		Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100		100		100		100		100		100	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							5000000		5000000		5000000		5000000		5000000
		Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A		1		1		1		1		1	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					1500000		4000000		4000000		4000000		5000000		5000000
		Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2		4		4		4		4		4	
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							5350000		5637000		5929000		5227000		5531000
		Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A		2		2		2		2		2	

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2690892604		2930302000		2972894000		3011714000		3042080000		3046627000
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kematangan organisasi	Angka	42		43		44		45		46		47	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	79		80		81		82		82		83	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2003742104		2183318618		2183318618		2291044000		2290749548		2300185455
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					14700000		10000000		10000000		10000000		10000000		10000000
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4		4		4		4		4		4	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1989042104		2168618618		2168618618		2276344000		2276049548		2285485455
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13		16		16		16		16		16	
X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							4700000		4700000		4700000		4700000		4700000
		Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5		5		5		5		5		5	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					90821500		114509500		115775382		123170000		122602000		127730000

		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100
			Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	50,9		51		51,1		51,2		51,3		51,4
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					795000		1755000		1775000		2125000		2125000	2750000
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1		2		2		2		2		2
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					77939000		62884500		63879582		67950000		67250000	68550000
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		4		4		4		4		4
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					2725000		7250000		7500000		8250000		8525000	9250000
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2		2		2		2		2		2
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					845500		5500000		5500000		7500000		7500000	8500000
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2		2		2		2		2		2
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4976000		19738000		19738800		19845000		19452000	20455000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3		3		3		3		3		3
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3541000		7382000		7382000		7500000		7750000	8225000
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3		3		3		3		3		3
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							10000000		10000000		10000000		10000000	10000000

		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3		3		3		3		3		3	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140339000		94150000		96300000		102500000		102500000		104564093
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel							10000000		10000000		10000000		10000000		10000000
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A		2		2		2		2		2	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					13200000		15000000		15000000		17000000		16000000		17500000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4		6		6		6		6		6	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100839000		40100000				46000000				45064093
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1		N/A		1		N/A		1	
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									45000000				46000000		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A		N/A		1		N/A		1		N/A	
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					26300000		29050000		26300000		29500000		30500000		32000000

		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9780000		65823882		105000000				32228452	
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A		100		100		100		100		100
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					9780000		24750800		35000000					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1		1		1		N/A		N/A		N/A
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							26073082		35000000				32228452	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A		2		2		N/A		2		N/A
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							15000000		35000000					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A		1		2		N/A		N/A		N/A
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					443000000		452500000		452500000		475000000		472000000	490147452
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					61000000		65000000		65000000		75000000		74000000	75000000

		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4		5		5		5		5		5	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					372000000		372500000		372500000		385000000		384000000		400147452
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13		12		12		12		12		12	
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10000000		15000000		15000000		15000000		14000000		15000000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1		2		2		2		2		2	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3210000		20000000		20000000		20000000		22000000		24000000
		Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100		100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1635000		10000000		10000000		10000000		11000000		12000000
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		4		4		4		4		4	
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1575000		10000000		10000000		10000000		11000000		12000000
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4		4		4		4		4		4	

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal		Target					
			Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80,85	81,3	81,4	81,45	81,46	81,5	81,6
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56
		Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100

Sumber: e-Planning Tahun 2025

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Banyumas Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN PRIORITAS	KET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PB, PG
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PB
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	PG

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Banyumas menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Banyumas dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2030. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kecamatan Banyumas agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Kecamatan Banyumas agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Banyumas, 22 September 2025
Camat Banyumas



Jakarta Tisam, S. STP., M. Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790725 199711 1 001

Lampiran I

Tabel Register Risiko Strategis Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian*	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas	1	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Kinerja Individu tidak mendukung capaian kinerja organisasi	Belum tepatnya pembagian tugas dan peran individu untuk pencapaian tugas organisasi	1. Kinerja Kecamatan menjadi kurang akuntabel 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan 3. Kinerja organisasi tidak tercapai	1. Kecamatan	Mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja	E	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengadakan Bimbingan Teknis Aparatur tentang SAKIP	Camat	Tahun 2026
		2	Presentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Adanya aduan ketidakpuasan atas pelayanan perangkat daerah	Ekspektasi masyarakat tidak terpenuhi karena masih adanya masyarakat yang lambat terlayani	1. Kinerja Pelayanan Kecamatan dianggap kurang memuaskan 2. Ketidakpuasan Masyarakat terhadap kinerja Kecamatan	1. Kecamatan 2. Masyarakat	Mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja	E	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja dan FKP	Camat	Tahun 2026